



**BUPATI BANTUL**  
*ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ*

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
INSTRUKSI BUPATI BANTUL  
NOMOR 7 /Instr/2021

TENTANG  
PERPANJANGAN KEDUA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN  
MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DI KABUPATEN BANTUL UNTUK  
PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

BUPATI BANTUL,

Sebagai tindak lanjut kebijakan Pemerintah dalam pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, sebagaimana diperintahkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7/Instr/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, dengan ini :

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul;
2. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Bantul;
3. Pimpinan BUMN/BUMD/Instansi Swasta/Organisasi Kemasyarakatan se-Kabupaten Bantul;
4. Panewu se-Kabupaten Bantul;
5. Lurah se-Kabupaten Bantul;
6. Dukuh dan Ketua Rukun Tetangga (RT) se-Kabupaten Bantul;
7. Masyarakat Kabupaten Bantul.

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kode Pos 55711 Telp (0274) 367509 Faxes (0274) 367424  
E-mail : [bupatibantul@bantulkab.go.id](mailto:bupatibantul@bantulkab.go.id)  
Website <http://www.bupatibantul.bantulkab.go.id>

- Untuk  
KESATU : Memperpanjang kedua kali Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT) untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, mulai tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan 22 Maret 2021.
- KEDUA : PPKM Mikro sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempertimbangkan zonasi pengendalian Covid-19 di tingkat Rukun Tetangga (RT), dengan kriteria sebagai berikut :
- a. **Zona Hijau**, dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di tingkat RT, skenario pengendalian dilakukan dengan *surveilans* aktif, seluruh suspek dilakukan tes, dan pemantauan kasus dilakukan secara rutin dan berkala;
  - b. **Zona Kuning**, dengan kriteria terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif Covid-19 dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
  - c. **Zona Orange**, dengan kriteria terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif Covid-19 dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup tempat ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya, kecuali sektor esensial; dan

- d. **Zona Merah**, dengan kriteria terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif Covid-19 dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, skenario pengendalian dengan pemberlakuan PPKM Mikro Tingkat RT, meliputi:
1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
  2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
  3. menutup tempat ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya, kecuali sektor esensial;
  4. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
  5. membatasi keluar masuk wilayah RT sampai dengan pukul 20.00 WIB;
  6. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan Covid-19.

KETIGA

: PPKM Mikro sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dilaksanakan melalui koordinasi seluruh unsur mulai dari Ketua RT, Dukuh, Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Kertertiban dan Ketenteraman Masyarakat (Babinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak PKK, Posyandu, Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda/Karang Taruna, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan relawan lainnya.

- KEEMPAT : Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan membentuk Pos Komando (Posko) Tingkat Kalurahan, yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah, dipimpin oleh Lurah sebagai Ketua, dibantu Pamong Kalurahan dan Mitra Kalurahan lainnya (Satlinmas, Babinsa, Babinkamtibmas, tokoh masyarakat, dan mitra Kalurahan lainnya), dan untuk melakukan supervisi dibentuk Pos Komando (Posko) Tingkat Kapanewon.
- KELIMA : Posko Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT merupakan lokasi atau tempat untuk Posko Penanganan Covid-19 Tingkat Kalurahan, yang memiliki fungsi :
- a. pencegahan;
  - b. penanganan;
  - c. pembinaan; dan
  - d. pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 tingkat Kalurahan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Posko Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Kapanewon, Kabupaten, Provinsi, TNI/POLRI, dan disampaikan kepada Satgas Covid-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
- KETUJUH : Kebutuhan pembiayaan Posko Tingkat Kalurahan, sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT dibebankan pada :
- a. kebutuhan tingkat Kalurahan dibebankan pada APBKalurahan bersumber dari Dana Desa dan dapat didukung dengan sumber pendapatan lainnya;
  - b. kebutuhan pembiayaan untuk Babinsa/ Babinkamtibmas dibebankan pada Anggaran TNI/Polri;

- c. kebutuhan pembiayaan untuk *testing, tracing,* dan *treatment,* dapat bersumber dari APBD DIY, dan/atau APBD Kabupaten Bantul;
- d. kebutuhan pembiayaan terkait kebutuhan hidup dasar dapat bersumber dari APBD DIY, APBD Kabupaten Bantul, dan/atau APBKalurahan.

KEDELAPAN

: PPKM Mikro sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan bersamaan dengan PPKM Tingkat Kabupaten meliputi :

a. Perkantoran Pemerintah dan Swasta.

1. Menerapkan sistem kerja dari rumah (*Work From Home/WFH*) untuk jenis pekerjaan yang dapat dikerjakan dari rumah sebanyak 50% (lima puluh persen) dan sistem kerja di kantor (*Work From Office/WFO*) sebanyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah karyawan, dengan ketentuan pejabat yang harus selalu berada di Kantor :

- a) Pejabat eselon II, Sekretaris, dan Kepala Bagian, pada Sekretariat Daerah, Badan, Dinas, Inspektorat Daerah, dan Sekretariat DPRD;
- b) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah;
- c) Panewu dan Panewu Anom pada Kapanewon; dan
- d) Lurah dan Carik pada Kalurahan.

2. Sistem kerja dari rumah (*Work From Home/WFH*) tidak diberlakukan untuk perangkat daerah dan unit kerja :

- a) Dinas Kesehatan;
- b) Satuan Polisi Pamong Praja;
- c) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d) Rumah Sakit Umum Daerah dan rumah sakit swasta;
- e) Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik dan sarana pelayanan Kesehatan lainnya;

- f) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten, Kapanewon, dan Kalurahan; dan
  - g) Unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani Kesehatan, kebersihan dan persampahan, dan unit kerja lain sesuai kepentingan instansi.
3. Sistem kerja dari rumah (*Work From Home/WFH*), pada Instansi Vertikal, BUMN/BUMD pengaturannya berdasarkan kebijakan pimpinan instansi masing-masing.
  4. Dalam hal jumlah karyawan terbatas atau jenis pekerjaan tidak dapat dilaksanakan untuk dikerjakan dari rumah, Pimpinan instansi dapat mengatur prosentase WFH sesuai kebutuhan, dengan tetap memperhatikan terlaksananya protokol Kesehatan secara optimal.
  5. Sistem kerja dari rumah (*Work From Home/WFH*) dilaksanakan dengan Surat Perintah Kepala Instansi, diberikan target kinerja WFH, dan untuk perangkat daerah dan Kapanewon pelaksanaannya dilaporkan ke BKPP Kabupaten Bantul, dan untuk Kalurahan dilaporkan kepada Panewu.
  6. Perangkat Daerah, BUMN/BUMD, dan Instansi lainnya yang mempunyai aplikasi untuk pelayanan masyarakat secara *online*, agar mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi untuk memberikan pelayanan masyarakat secara *online*.
  7. Kegiatan rapat agar dioptimalkan dilaksanakan secara *virtual*, tatap muka dalam ruangan dapat dilakukan dengan jumlah peserta paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan.

8. ASN Pemerintah Daerah, BUMD dan Pemerintah Kalurahan dilarang melakukan perjalanan dinas ke luar Daerah Istimewa Yogyakarta.
  9. Perangkat Daerah, BUMD dan Pemerintah Kalurahan dilarang menerima tamu kunjungan dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Pembelajaran di Sekolah dan Kegiatan Pelatihan.
1. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan melalui jarak jauh (*online/daring*).
  2. Sekolah/Satuan Pendidikan dapat memfasilitasi peserta didik yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan belajar jarak jauh (*online/daring*), yang disebabkan ketiadaan sarana komunikasi, keterbatasan jaringan internet di lokasi tempat tinggal, serta sebab lainnya, dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan secara ketat.
  3. Kegiatan pelatihan agar dilaksanakan secara jarak jauh (*online/daring*).
- c. Perdagangan dan jasa.
1. Kegiatan Pasar rakyat dibatasi sampai dengan paling lama jam 12.00 WIB dengan pengawasan protokol Kesehatan secara ketat.
  2. Toko swalayan, toko kelontong dan sejenisnya dibatasi jam buka paling lama sampai dengan jam 21.00 WIB, dengan penerapan protokol Kesehatan yang ketat.
  3. Pusat kuliner, café, restoran, jasa boga, diizinkan memberikan pelayanan makan dan minum di tempat sampai dengan jam 21.00 WIB dengan kapasitas tempat duduk paling banyak 50% (lima puluh persen), dan untuk pelayanan dibawa pulang sampai dengan jam 22.00 WIB, selama pelayanan untuk dibawa pulang agar tidak menyediakan tempat duduk.

4. Pedagang Kaki Lima diizinkan buka sampai dengan jam 21.00 WIB untuk pelayanan dimakan di tempat, dan untuk pelayanan dibawa pulang sampai dengan jam 22.00 WIB, selama pelayanan untuk dibawa pulang agar tidak menyediakan tempat duduk.

d. Sosial Kemasyarakatan.

1. Kegiatan sosial kemasyarakatan, pentas seni budaya, dan keramaian umum yang menimbulkan kerumunan dilarang untuk dilaksanakan pada masa PPKM Mikro dan PPKM Kabupaten.

2. Kegiatan rapat Rukun Tetangga (RT), Dasawisma, PKK dan sejenisnya di wilayah RT dengan Zona Kuning, Zona Orange dan Zona Merah, agar ditunda pelaksanaannya setelah masa PPKM Mikro dan PPKM Kabupaten.

e. Adat istiadat (hajatan, pernikahan, dan sejenisnya).

Acara hajatan, pernikahan, syukuran, dan kegiatan adat istiadat sejenis disarankan ditunda, apabila tetap dilaksanakan disarankan :

1. Acara dilaksanakan secara sederhana dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;

2. Hanya melibatkan keluarga inti dan tamu lainnya dengan jumlah paling banyak 100 (seratus) orang;

3. Jamuan diberikan dalam kemasan kotak/dus tertutup, dan apabila dilaksanakan prasmanan harus disediakan petugas yang cukup untuk melayani tamu sehingga tamu tidak mengambil sendiri jamuan yang disajikan;

4. Pentas seni/hiburan yang tidak melibatkan banyak orang dan tidak menimbulkan kerumunan dapat disajikan selama kegiatan berlangsung;

5. Apabila terdapat tamu dari luar DIY disyaratkan menunjukkan negatif/non reaktif hasil rapid tes *antigen/antibody*;
  6. Sebelum melaksanakan kegiatan, penyelenggara harus meminta rekomendasi dari Satgas Covid-19 Kapanewon, dan memberitahukan kepada Kepolisian setempat.
- f. Peribadatan.
1. Masyarakat disarankan melaksanakan kegiatan peribadatan di rumah masing-masing.
  2. Kegiatan peribadatan di tempat ibadat dapat dipergunakan untuk lingkungan sekitar tempat ibadat/warga jamaah setempat, dengan ketentuan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat ibadat.
  3. Lanjut usia (Lansia) di atas 60 (enam puluh) tahun, orang sakit, anak-anak usia di bawah usia 10 (sepuluh) tahun, tidak dianjurkan untuk melaksanakan ibadah di tempat Ibadah, karena rentan tertular Covid-19.
  4. Dilarang menyelenggarakan kegiatan keagamaan bersifat masal yang menimbulkan kerumunan selama masa PPKM Mikro dan PPKM Tingkat Kabupaten.
- g. Tempat Wisata/rekreasi.
1. Pengunjung tempat wisata/rekreasi dan Tempat hiburan dibatasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas, dengan pengawasan yang ketat dari penyelenggara untuk mencegah kerumunan.
  2. Jam buka tempat wisata/rekreasi dan tempat hiburan dibatasi mulai jam 05.00 – 20.00 WIB.

- KESEMBILAN : Kegiatan sektor dasar dan penting (*esensial*), antara lain kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, logistik, perhotelan, konstruksi, industri, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri strategis yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional dan obyek tertentu, serta kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol Kesehatan secara lebih ketat.
- KESEPULUH : Untuk meningkatkan penerapan secara ketat protokol Kesehatan, pada setiap kegiatan masyarakat maupun kegiatan perkantoran, meliputi :
- a. Penggunaan masker sesuai standar Kesehatan secara baik dan benar;
  - b. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun pada air mengalir/*handsanitizer*;
  - c. Menjaga jarak 1 m (satu meter) sampai dengan 2 m (dua meter); dan
  - d. Mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19.
- KESEBELAS : Setiap pelaku perjalanan dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tinggal sementara di Kabupaten Bantul dan/atau melaksanakan kegiatan masyarakat yang diizinkan secara terbatas dengan syarat tertentu berdasarkan Instruksi Bupati ini, harus memberikan informasi melalui aplikasi **PANCOBAN** yang dapat diunduh melalui *Play Store*.
- KEDUABELAS : Kepala Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Panewu, dan Lurah agar melakukan konsolidasi dan sosialisasi pelaksanaan PPKM Mikro dan PPKM Tingkat Kabupaten berdasarkan Instruksi Bupati ini, sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

- KETIGABELAS : Satgas Pengawasan Hukum Satgas Covid-19 Kabupaten bekerjasama dengan aparat TNI/Polri, agar melakukan pengawasan kegiatan masyarakat selama masa PPKM Mikro dan PPKM Tingkat Kabupaten berdasarkan Instruksi Bupati ini, yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan/atau melanggar protokol Kesehatan.
- KEEMPATBELAS : Panewu, Lurah, Satgas Covid-19 Kapanewon, Satgas Covid-19 Kalurahan bekerjasama dengan TNI/Polri di wilayah masing-masing, agar melibatkan masyarakat secara aktif untuk terlaksananya PPKM Mikro berdasarkan Instruksi Bupati ini.
- KELIMABELAS : Satgas Penegakan Hukum Satgas Covid-19 Kabupaten, Satgas Covid-19 Kapanewon bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian (TNI/Polri), berwenang melakukan penegakan hukum pelaksanaan PPKM Mikro dan PPKM Tingkat Kabupaten berdasarkan Instruksi Bupati ini berupa :
- a. memberikan teguran kepada penyelenggara kegiatan masyarakat;
  - b. menghentikan, membubarkan, atau menutup kegiatan masyarakat; dan/atau
  - c. bentuk penegakan hukum lainnya selama masa PPKM Mikro dan PPKM Tingkat Kabupaten berdasarkan Instruksi Bupati ini.
- KEENAMBELAS : Mengoptimalkan Posko Satgas Covid-19 Kabupaten, Kapanewon, Kalurahan, sampai dengan tingkat Padukuhan atau RT, dengan :
- a. membentuk Posko Covid-19 di tingkat Padukuhan/RT dengan melibatkan jaga warga dan/atau partisipasi masyarakat; dan
  - b. menegakkan protokol Kesehatan di rumah warga/ lapangan terbuka/Gedung pertemuan dan tempat lain yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan/atau tidak menerapkan protokol kesehatan.

- KETUJUHBELAS : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Bupati Bantul.
- KEDELAPANBELAS : Pada saat Instruksi Bupati ini mulai berlaku, maka Instruksi Bupati Bantul Nomor 6/Instr/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Kabupaten Bantul Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILANBELAS : Instruksi Bupati ini berlaku mulai tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan 22 Maret 2021.

Dikeluarkan di Bantul

Pada tanggal 8 Maret 2021



BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY.
2. Pimpinan Forkompimda Kabupaten Bantul.
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul.
4. Panewu dan Lurah se-Kabupaten Bantul.
5. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan se-Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.